

DISERTASI

**DINAMIKA STRATEGI BERTAHAN HIDUP KELUARGA
NELAYAN MISKIN PESISIR DI DESA OLIMEYALA,
KECAMATAN BILUHU, KABUPATEN GORONTALO**

**DYNAMIC OF SURVIVAL STRATEGY FOR COASTAL POOR
FISHERMAN FAMILIES IN OLIMEYALA VILLAGE,
BILUHU DISTRICT, GORONTALO REGENCY**



**SAFWAN T. BANO
NIM. E023192002**

**PROGRAM DOKTORAL ILMU ANTROPOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**DINAMIKA STRATEGI BERTAHAN HIDUP KELUARGA NELAYAN
MISKIN PESISIR DI DESA OLIMEYALA KECAMATAN BILUHU
KABUPATEN GORONTALO**

Disusun dan diajukan oleh

SAFWAN TAHIR BANO

E023192002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 24 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.
Nip. 196112271988111002

Ko. Promotor,



Prof. Dr. Munsil Lampe, MA.
NIP 195612271986121001

Plt. Ketua Program Studi
Antropologi,



Dr. Yahya, MA.
NIP 196212312000121001

Ko. Promotor,



Dr. Mashadi, S.Ag., M.Si.
NIP 197211262003121003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAFWAN TAHIR BANO**
Nomor Induk Mahasiswa : E023192002
Program Studi : Doktor Ilmu Antropologi dan
Sosial Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan disertasi, saya bersedia disertasi dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 08 Februari 2023

Mahasiswa,



SAFWAN TAHIR BANO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat melakukan studi dengan baik di Program Doktor (S3) Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Pada dasarnya disertasi bukan hanya hasil penelitian untuk mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Namun, Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan secara mendalam tiga hal:

1. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi keluarga nelayan yang menimbulkan kondisi kemiskinan nelayan di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana dinamika strategi bertahan hidup yang ditempuh nelayan miskin di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi?
3. Sejauhmana upaya alternatif pemerintah memberdayakan aspek- aspek kehidupan sosial budaya keluarga nelayan di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo?

Secara esensial, disertasi ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann serta teori Konstruksi Sosial Max Weber. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab kemiskinan nelayan di Olimeyala, dari aspek ekonomi adalah tidak adanya aset

produksi yang dimiliki berupa perahu yang dapat mereka gunakan untuk melaut. Pada aspek sosial-budaya terutama pangan dan sandang. Keterbatasan pangan membuat mereka mengatur strategi pinjam-meminjam beras kepada tetangga atau pada kerabat mereka. Selain itu, terbatasnya beras membuat mereka melakukan substitusi beras dengan jagung atau singkong. Pada aspek pendidikan. Secara umum mereka tidak bersekolah dan berpendidikan rendah, sehingga kemampuannya hanyalah terbatas pada pengalaman-pengalaman kecil dan tradisional.

Kemudian, strategi bertahan hidup nelayan miskin sangat beragam agar dapat survive dan secara lebih kreatif seperti (i) Strategi Diversifikasi. Melalui strategi ini nelayan mengerjakan pekerjaan lain selain melaut. Pekerjaan tersebut antara lain: buruh bangunan, tukang kupas kelapa, menggarap lahan pertanian, membantu petani rumput laut, dan lain-lain. Selain diversifikasi, mereka juga melakukan (ii) Strategi pasif. Dalam strategi ini mereka mengandalkan sumber daya orang lain untuk berusaha dan membantu, misalnya mereka mengurangi frekuensi makan karena menghemat beras, atau mengganti beras dengan singkong atau jagung. Bila mereka kehabisan modal, uang atau beras mereka biasanya meminjam kepada tetangga atau keluarga, atau kerabat. Mereka akan membayarnya dengan uang atau barang yang sama bila mereka sudah memilikinya.

Upaya alternatif memberdayakan aspek-aspek kehidupan sosial budaya nelayan miskin berasal dari bantuan program pemberdayaan

melalui pemerintah untuk nelayan miskin di Olimeyala. Program pemberdayaan tersebut seperti (i) Bantuan Langsung Tunai untuk Covid. (ii) Bantuan Pangan Non-Tunai, (iii) Bantuan pengasaan Perahu, (iv) Bantuan Keluarga Harapan, (v) Bantuan rumah layak huni. Program-program ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial-budaya nelayan Olimeyala dengan perbaikan kesejahteraan hidup mereka.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Kepada Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp. M.,(K).,M.Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pasca Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Kepada Dr. Phil. Sukri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta stafnya yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Promotor Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Prof. Dr. Munsil Lampe, MA sebagai Co-Promotor I dan kepada Dr. Mashadi, S.Ag., M.Si sebagai Co-Promotor II, karena telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat konstruktif dan bermanfaat untuk memahami antropologi dengan baik. Dari merekalah saya mengetahui beragam paradigma dan metode untuk masuk dalam

setting yang sensitif untuk mengungkap dan menjabarkannya secara komprehensif dalam sebuah karya disertasi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Mahmud Tang, MA; Dr. Tasrifin Tahara, M.Si dan Prof. drs. Hasbi, M.Si., Ph.D sebagai penguji, yang memberikan tanggapan kritis pada saat ujian berlangsung dan mampu merubah sudut pandang saya tentang antropologi dan bagaimana fenomena sosial-budaya terkait dengan kemiskinan nelayan diketahui dan dieksplanasi secara komprehensif.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Mahmud Tang, MA Prof. Dr. M. Yamin Sani, MS; Prof. Dr. Hamka Naping, MA; Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA; Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D; Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA; Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.Si; Dr. Muhammad Basir, MA, Dr. Yahya, MA; Dr. Sapriadi, MA; Dr. Lahaji Haedar, M.Ag; dan Dr. Mashadi, M.Si, karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan berlangsung, dan membuka wawasan saya tentang paradigma, metode dan praktek penelitian untuk melihat secara objektif realitas sosial-budaya dalam perspektif antropologi.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo,

M.Pd.selaku Bupati Gorontalo yang telah memfasilitasi, membimbing dan memotivasi saya selama ini sehingga berhasil menyelesaikan studi S3 dan dapat meraih gelar Doktor Bidang Antropologi pada FISIP UNHAS Makassar. Dan juga kepada Pimpinan Perangkat Daerah terkait, Kadis PMD-Pemdes, Kadis Sosial, Kadis Perkim dan Kadis Perikanan dan Kelautan, BKPSDM .serta seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan baik data primer dan data sekunder untuk keperluan penulisan karya desertasi ini.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Camat Biluhu, bapak Anton Panani, S.Pd Ayahnda Kepala Desa Olimeyala bapak Hamzah Ismail, A.M.Pd, Ketua dan Anggota BPD Desa Olimeyala, para Tokoh Masyarakat, Agama dan Adat Desa Olimeyala serta seluruh informan, yang di tengah kesibukannya bersedia diwawancarai untuk menemukan data yang akan saya interpretasi dan ekplanasi secara mendalam. Dari kalianlah saya mendapatkan data berharga dan semakin mengajarkanku agar mampu menganalisis, menjustifikasi, menemukan dan mengkonstruksi teori yang relevan tentang problem sosial-budaya khususnya fenomena kemiskinan nelayan pesisir di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, yang hingga saat ini masih harus diperhatikan dan diselesaikan dengan baik.

Ucapkan terimakasih yang tulus kepada Ayahanda Tahir Bano dan Ibunda Rahima Harun serta saudaraku Aisiah Bano, (Alm) Azis Bano, Lukman Bano, Samsaha Bano, Harun Bano, Amin Bano dan Saripudin Bano atas segala doa restu, nasehat dan bantuan agar saya selalu sehat dan sukses dalam mengejar cita-cita serta dapat menjadi manusia yang selalu komitmen dengan janji yang telah diikrarkan untuk berguna bagi keluarga dan orang lain.

Ucapan terimakasih yang tulus kepada istriku tercinta Indrawani K. Yusuf, anakku tersayang Nurainun Madjid S.Bano, Aghil Mutmainnah, Moh. Rezza Abdullatif ST.Bano, dan Shalsa Nuruljannah. Dari kalianlah saya mengenal cinta kasih yang tulus dan spirit sebagai seorang ayah dan sebagai laki-laki tangguh untuk melanjutkan studi di Program Studi Doktoral (S3) Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,

SAFWAN TAHIR BANO

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	viv
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kemiskinan Nelayan dan Penyebabnya	12
1. Konsep Kemiskinan	12
2. Penyebab Kemiskinan Nelayan	23
B. Strategi Pemecahan Masalah dan Dinamika Strategi Bertahan Hidup	26
1. Konsep Strategi.....	26
2. Konsep Strategi Nafkah	31
C. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin Oleh	

Pemerintah.....	33
1. Program Pemerintah	33
2. Pemberdayaan.....	34
D. Perspektif Teoretik.....	41
1. Teori Konstruksi Sosial.....	41
2. Teori Tindakan Sosial.....	51
E. Kerangka Konseptual	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
1. Jenis Penelitian	61
2. Pendekatan Penelitian.....	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian	63
C. Informan Penelitian	64
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	66
1. Jenis Data.....	66
2. Sumber Data	67
E. Metode Pencarian Data	68
1. Wawancara Mendalam (<i>Indepth Interview</i>).....	68
2. Dokumentasi.....	70
3. Observasi	70
F. Metode Analisis Data	71
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	72
H. Etika Penelitian	74

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	77
A. Profil Kecamatan Biluhu	77
B. Profil Desa Olimeyala	79
1. Sejarah Desa Olimeyala.....	79
2. Letak geografis lokasi penelitian	80
3. Kondisi demografis	81
4. Struktur pemerintahan Desa Olimeyala, Kecamatan Biluhu.....	83
5. Mata Pencaharian Nelayan	84
6. Agama	85
7. Sarana dan Prasarana	86
8. Sistem Keekerabatan Masyarakat Gorontalo.....	87
C. Profil Keluarga Miskin.....	89
1. Keluarga Fiter Polapa.....	92
2. Keluarga Anton Baruadi	100
3. Keluarga Engki Jafar	103
4. Keluarga Pipin Mantolongi	105
5. Keluarga Wardon Salasa	108
6. Keluarga Usman Supu	111
 BAB V MASALAH-MASALAH SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	
 YANG DIHADAPI KELUARGA NELAYAN.....	115
A. Kurangnya Sumber Daya Manusia.....	115
1. Pengetahuan Tentang Nelayan	115

2. Pengetahuan Tentang Pelayaran.....	116
3. Pengetahuan Tentang Penangkapan.....	117
4. Masalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Laut.....	120
B. Kekurangmampuan Nelayan Mengelola Modal	123
C. Teknologi Produksi yang Rendah	124
D. Posisi Tawar yang Lemah Dalam Akses Modal dan Pasar	128
E. Perubahan Lingkungan Laut	131
F. Pembagian Hasil Laut yang Timpang.....	134
G. Ledakan Penduduk.....	136
H. Kurang Mendapat Perhatian Pemerintah	139

BAB VI DINAMIKA STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

KEMISKINAN	143
A. Perbaikan Alat-alat Produksi	144
B. Membangun Jaringan Modal Ekonomi	145
C. Diversifikasi Usaha Penangkapan Ikan	148
D. Membangun Jaringan Pemasaran.....	163
E. Alternatif Pekerjaan Di Luar Penangkapan Ikan.....	174
1. Menjadi Buruh Harian Tukang Kupas Kelapa	175
2. Menjadi Petani Penggarap.....	176
3. Menjadi Buruh Bangunan.....	177
4. Membantu Petani Rumput Laut.....	178

F. Belajar Menabung.....	179
G. Pengelolaan Konsumsi	184

BAB VII PARTSIPASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN

ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA KELUARGA NELAYAN

DARI PEMERINTAH	191
A. Program BLT Covid-19.....	191
B. Program Bantuan Rumah Layak Huni.....	201
C. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	207
D. Program Keluarga Harapan	208
E. Program Bantuan Perahu.....	218
a. Pelaksanaan Program secara Efektifitas dan Efisien	220
b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kapal Berdasarkan Jumlah Nelayan	223
c. Kendala Program Pemberian Bantuan Perahu.	226
1. Keterbatasan Anggaran	226
2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	228
3. Mengatasi Kendala Pemberdayaan Melalui Pemberian Perahu Tangkap.....	231
3.1. Mengupayakan Partisipasi Masyarakat	231
3.2. Mengupayakan Peningkatan Sarana	

DAFTAR TABEL

4.1 Keadaan Penduduk Desa Olimeyala Berdasarkan Umur.....	82
4.2 Keadaan Penduduk Desa Olimeyala berdasarkan Pendidikan.....	82
7.1 Alternatif pekerjaan nelayan Olimeyala.....	147
8.1 Faktor Penyebab Kemiskinan nelayan	242

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

2.1	Tindakan sosial Weber.....	58
2.2	Skema Kerangka Konseptual.....	60
4.1	Peta Lokasi Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.....	81
4.2	Struktur pemerintahan desa Olimeyala.....	83
4.3	Perahu dan bagian-bagiannya.....	119

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kantor Desa Olimeyala.....	264
2. Kondisi Rumah Nelayan	264
3. Kondisi Lingkungan pantai dan Perahu	265
4. Kondisi Lingkungan. Pantai dan perahu 2	265
5. Aktifitas Sosial warga nelayan olimeyala (rehab mesjid).....	266
6. Aktifitas Sosial warga nelayan	266
7. Perahu viber ukuran 7 meter bantuan dana desa.....	267
8. Rumah warga nelayan.....	267
9. Rumah warga nelayan.....	268
10. Kondisi rumah nelayan	268
11. Kondisi rumah warga nelayan pra sejahtera	269
12. Persiapan melaut dan alat tangkap jarring/pukat kecil	269
13. Persiapan melaut diatas perahu viber dengan mesin katinting 9PK.....	270
14. Persiapan melaut dengan kelompok nelayan.....	270

ABSTRAK

SAFWAN T. BANO. Dinamika Strategi Bertahan Hidup Keluarga Miskin Nelayan Pesisir Di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Dibimbing Oleh Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Prof. Dr. Munsi Lampe, MA; Dr. Mashadi, S.Ag., M.Si.

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan masalah yang dialami masyarakat nelayan miskin dan menganalisis strategi-strategi yang ditempuh nelayan miskin di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Serta menggambarkan realitas keberlanjutan hidup masyarakat nelayan miskin di tengah situasi kemiskinan dan upaya alternatif pemerintah memberdayakan aspek-aspek kehidupan sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian yaitu Aparat Pemerintahan Desa, Aparat Dinas terkait, penduduk setempat, dan wanita nelayan, serta anak-anak nelayan. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Data sekunder bersumber dari jurnal dan buku yang diterbitkan secara online dan cetak. Analisis data dilakukan dengan cara menyalin data, membaca keseluruhan data, menganalisis secara detail dan mendeskripsikannya secara holistik-integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika strategi bertahan hidup nelayan miskin yaitu melakukan strategi diversifikasi misalnya menjadi buruh bangunan, tukang kupas kelapa, menggarap lahan pertanian, membantu petani rumput laut, dan lain-lain. Selain diversifikasi, mereka juga melakukan Strategi pasif strategi mengandalkan sumber daya orang lain untuk berusaha dan membantu kebutuhan mereka. Selain itu, upaya alternatif memberdayakan nelayan miskin dilakukan oleh pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai untuk Covid-19, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Perahu, Bantuan Keluarga Harapan dan Bantuan rumah layak huni.

Kata kunci: Dinamika, Strategi, bertahan hidup, nelayan miskin.



ABSTRACT

SAFWAN T. BANO. The Dynamics of Survival Strategies for Poor Families of Coastal Fishermen in Olimeyala Village, Biluhu District, Gorontalo Regency. Supervised by Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA; Dr. Mashadi, S.Ag., M.Si.

The research aims to identify and explain the problems experienced by poor fishing communities and analyze the strategies adopted by poor fishermen in Olimeyala Village, Biluhu District, Gorontalo Regency. As well as describing the reality of the survival of poor fishing communities in the midst of a situation of poverty and the government's alternative efforts to empower aspects of socio-cultural life. This study uses a qualitative method. Research informants are Village Government Officials, related Service Officials, local residents, and fisherwomen, as well as fishermen's children. Primary data was obtained by means of observation and in-depth interviews. Secondary data comes from journals and books published online and in print. Data analysis was carried out by copying the data, reading the entire data, analyzing it in detail, and describing it holistically-integratively. The results of the study show that the dynamics of the poor fishermen's survival strategy is to carry out a diversification strategy, for example by becoming a construction worker, coconut peeler, working on agricultural land, helping seaweed farmers, and others. In addition to diversification, they also carry out a passive strategy, a strategy of relying on other people's resources to try and help their needs. In addition, alternative efforts to empower poor fishermen are carried out by the government, namely Direct Cash Assistance for Covid-19, Non-Cash Food Assistance, Boat Assistance, Family Hope Assistance, and Livable House Assistance.

Keywords: Dynamics, strategy, survival, poor fishermen.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan juga dikenal sebagai negara yang masyarakatnya sebagai nelayan dan pelayar. Namun demikian, status tersebut tak lantas berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan kaum nelayan tersebut. Kondisi ini dimunculkan oleh data Sosio-Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang diperoleh melalui survei di 2017. Hasilnya menegaskan bahwa salah satu pekerjaan termiskin adalah nelayan di Indonesia. Rinciannya adalah terdapat 11,34% orang di sektor perikanan yang tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayanan restoran (5,56%), konstruksi bangunan (9,86%), serta pengelolaan sampah (9,62%). Jumlah ini bahkan diperkuat oleh data BPS Nasional 2016 yang mencatat bahwa kurun waktu 2000-2016 terjadi penurunan drastis jumlah rumah tangga nelayan dari 2000 menjadi 966 buah. Pada tahun yang sama juga (2016), data Lembaga Pangan dan Pertanian (FAO) dunia merilis adanya penurunan jumlah pekerja perikanan tangkap, misalnya di Eropa penurunan tersebut terjadi pada 2000-2014 dari 779 menjadi 413 ribu nelayan. Situasi yang sama juga melanda Amerika Utara dan Oceania (KKP, 2020).

Berbicara kemiskinan, Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan nasional pada Maret 2020 adalah sejumlah Rp 454.652 per

kapita per bulan. Padahal, garis kemiskinan yang distandarkan oleh Bank Dunia adalah sejumlah 1,9 dollar AS per kapita per hari atau setara Rp 798.200 per bulan (kurs Rp 14.000). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin Indonesia berada dua kali lipat di bawah garis kemiskinan. Terkait hal ini, ciri kemiskinan di Indonesia menurut Adit (2021) adalah banyak rumah tangga di sekitar atau sedikit di atas garis kemiskinan nasional. "Sehingga meski tidak miskin, mereka rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, tetapi menjadi miskin karena tidak dapat mengakses pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dimaksud seperti ketersediaan air bersih dan perumahan yang layak huni. "Penggunaan garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat memunculkan angka kemiskinan yang keliru. Banyak orang akan terklasifikasi tidak miskin padahal sangat menderita," lanjut Adit. Indikator ini harus realistis dan mudah dipakai di lapangan, antara lain: status janda tanpa pekerjaan pendidikan kepala rumah tangga rendah kecilnya luas lantai rumah tidak adanya fasilitas buang air besar, sedangkan dari aspek gizi dan makanan, indikatornya adalah: konsumsi daging yang rendah sebaliknya konsumsi ikan asin tinggi adanya anak balita bergizi buruk dan stunting (Adit, 2011).

Sejak tahun awal 1960-an, komunitas nelayan bersama masyarakat petani di wilayah perdesaan menjadi perhatian besar pemerintah dalam hal implementasi program pembangunan. Melalui program Revolusi Pertanian (petani) dan Revolusi Biru (nelayan), keduanya menjadi sasaran

pemerintah dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Apalagi, pada masa era Orde Lama dan Orde Baru tersebut masyarakat Indonesia terkategori sebagai negara yang kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan (*underdevelopment*) sehingga perlu ditingkatkan kehidupannya.

Bagi masyarakat nelayan, program pembangunan tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologisasi alat tangkap ikan yang masih tradisional menjadi alat tangkap modern. Arifin (2015) dalam bukunya “Kekerasan Struktural Dalam Relasi Kerja Pinggawa-Sawi” menyatakan bahwa Dalam program Revolusi Biru, pemerintah meluncurkan program Teknologisasi alat tangkap tradisional seperti pukat, pancing, dayung, perahu kecil menjadi lebih modern seperti pukat harimau, kepala motor besar dengan mesin motor besar pula. Sasaran alih teknologi ini adalah peningkatan produktifitas nelayan agar kehidupan keluarga mereka lebih sejahtera.

Dalam perkembangannya, penerapan program Revolusi Biru (modernisasi perikanan) ternyata selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif bagi nelayan. Dampak positif yang dimaksud antara lain nelayan menjadi melek teknologi, dan terjadi peningkatan produktifitas nelayan. Mereka yang menggunakan teknologi modern menghasilkan tangkapan hasil laut yang besar dan kemudian berdampak terhadap kesejahteraan mereka (Hamzah, dkk, 2008). Adapun dampak negatifnya adalah terkurasnya sumber daya laut secara eksploitatif dan

massif akibat penggunaan teknologi modern, terjadinya konflik antar nelayan modern dengan nelayan tradisional (Anriani, 2018), dan mempertajam kelas sosial antar nelayan yaitu nelayan modern makin kaya dan nelayan miskin (tradisional) makin miskin. Tain (2011, 2013) dalam penelitiannya di Jawa Timur mengungkap salah satu penyebabnya adalah habisnya sumberdaya ikan di wilayah laut dangkal akibat penggunaan alat tangkap modern. Situasi ini berdampak pada pendapatan nelayan tradisional yang rendah (Kusnadi, 2016). Hal tersebut diperkuat oleh kuatnya pola pikir determinisme di kalangan nelayan tradisional. Konsep pola pikir merupakan bagian inti dari aspek budaya (kultur) sehingga dinamakan sebab kultural (Hakim, 2016).

Pada sisi lain, introduksi teknologi tersebut menimbulkan kegoncangan budaya melalui terjadinya berbagai pergeseran dan perubahan atas norma sosial budaya masyarakat nelayan. sejumlah perilaku dan tindakan sosial. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Kamaruddin & Harifuddin (2018) dalam bukunya 'Desa Dalam Perubahan' yang menguraikan aspek sosial yang berubah di lingkungan pedesaan akibat masuknya teknologi di kalangan mereka. Penguatan ini Ditemukan juga dalam penelitian Nikmah (2020) bahwa masuknya teknologi di kalangan nelayan tradisional dalam bentuk cara penangkapan ikan dan cara bagi hasil. Bagi nelayan modern, banyaknya jumlah nelayan buruh yang terlibat (hingga 12 orang) dalam sekali melaut berdampak pada kecilnya bagi hasil yang mereka peroleh. Hal tersebut karena sistem bagi hasil tidak

mengalami perubahan dimana pemilik perahu (pemilik modal) memperoleh bagian lebih besar. Model pembagian hasil seperti ini juga terjadi pada masyarakat nelayan di Nagari Pasar Lama Air Haji, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Gorontalo dimana pemodal atau pemilik perahu memperoleh 65% dan sisanya dibagi oleh nelayan buruh (Ermayanti, dkk. 2015).

Dalam beberapa tahun kemudian, kehidupan masyarakat nelayan pesisir banyak mengalami pergeseran dengan berbagai faktor penyebab. salah satu sebab utama adalah modernisasi perikanan (revolusi biru). Hanya saja, modernisasi tersebut tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional (Yuliana dkk, 2016). Tetapi cerita tentang mereka domainnya hanya terkait kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Banyak penelitian masyarakat nelayan bertemakan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat nelayan, peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, atau strategi nafkah dan seterusnya. Bahkan, berbagai program pemerintah pun banyak terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya stigma bahwa masyarakat nelayan pesisir merupakan salah satu kelompok masyarakat paling miskin di Indonesia (Imron, 2003). Penyebab stigma ini muncul adalah adanya kebijakan yang membatasi penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), serta kemajuan teknologi perikanan yang menggantikan peran nelayan. Rendahnya pendapatan nelayan menurut beberapa akademisi yang disebabkan oleh faktor alam seperti tantangan

cuaca ekstrem (Arifin, 2015). Uraian ini kontras dengan temuan penelitian Anna (2020) yang menemukan bahwa meskipun nelayan miskin tetapi mereka tetap bahagia. Penyebabnya adalah karakter pekerjaan nelayan yang membuat mereka menikmati kehidupan alam terbuka. Selain itu aspek perikanan yang penuh dengan “petualangan”, “kebebasan” dan “aktivitas di alam” berperan sebagai suatu bentuk terapi bagi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan 10 tahun terakhir rumah tangga nelayan di Indonesia terus menurun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu KK (Dinillah, 2017). Dinillah (2017) menyatakan bila hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor permasalahan yang terjadi. (1) pengambilan sumber daya alam berupa ikan laut oleh negara lain baik secara resmi ataupun ilegal, sehingga lapak tangkapan nelayan diserobot. (2) adanya penyerobotan penangkap ikan dari negara lain, kesejahteraan nelayan Indonesia berkurang akibat minimnya tangkapan. Hal ini menyebabkan banyak nelayan di Indonesia yang beralih ke profesi lainnya (buruh, tukang becak, hingga berpindah ke daerah lain). Bahkan, muncul kekhawatiran bila anak nelayan sendiri tidak lagi berminat menjadi nelayan (Imron, 2003). (3) nilai jual tangkapan nelayan di Indonesia tergolong rendah.

Menghadapi situasi hidup sebagaimana di atas, masyarakat nelayan pun memiliki daya upaya dan kreatifitas sebagai wujud ikhtiar dalam melangsungkan kehidupannya. Melangsungkan hidup merupakan naluri semua individu yang strateginya terkondisi secara sosial-budaya dan

lingkungan. Berbagai penelitian mengungkapkan upaya para nelayan tersebut untuk menghidupi keluarganya dengan cara mencari nafkah, misalnya mereka melibatkan anggota keluarga lainnya dalam mencari nafkah (Yuliana dkk, 2016), meminjam sesuatu dari tetangganya (Syuryani, 2017), Bahkan, pada saat yang sama mereka juga melakukan upaya untuk bertahan hidup dalam berbagai bentuk seperti memperbaiki manajemen keuangan, memberikan pendidikan informal dan formal untuk anak-anak mereka supaya dapat bertahan kelak (Therik dan Sahadula, 2017), berkebun seperti menanam ubi kayu dan ubi jalar, jagung, dan sayuran (Asis, 2019), mengatur pola konsumsi (Zaini, 2018), menjadi tukang atau buruh kebun serta menjadi asisten rumah tangga (Oktavia, 2017; Zainuddin dkk, 2020), dan seterusnya.

Untuk wilayah Indonesia, rata-rata masyarakat nelayan umumnya memiliki karakteristik yang tidak beda jauh termasuk di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu di Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah pesisir yang masyarakatnya juga sebagian besar hidup dari hasil laut atau berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan pengamatan awal sebagai pra studi, ukuran rumah para nelayan tergolong sederhana dan kecil dengan lantai berbahan semen plester, tembok terbuat dari papan dengan beratap seng/asbes. Bahkan tingkat pendidikan mereka tidak sampai selesai SD atau putus sekolah SD sehingga tidak ada yang memiliki ijazah. Mereka juga memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini berakibat pada ketiadaan modal untuk membiayai operasi penangkapan

ikan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut maka nelayan di wilayah ini dikategorikan sebagai nelayan miskin.

Kemiskinan nelayan tersebut juga disebabkan oleh faktor relasi kerja yang tidak seimbang. Misalnya dalam hal peminjaman uang, nelayan tradisional harus tunduk pada kesepakatan bersama untuk menjual ikan hasil tangkapannya pada nelayan juragan (pemilik modal) kemudian untuk pengembalian uang yang dipinjamkan apa bila mendapatkan hasil yang lebih baru boleh dikembalikan akan tetapi tidak harus mengembalikan semua dalam artian dicicil dulu. Bahkan cara bagi hasil antara nelayan juragan dan nelayan buruh dengan sistem, yaitu sesudah hasil tangkapan dijual dan dikurangi untuk biaya operasi, sisanya dibagi dua antara buruh nelayan dengan juragannya hal ini merugikan bagi para nelayan buruh.

Mengantisipasi kemiskinan nelayan tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak tinggal diam. Ada sejumlah program diimplementasikan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan tersebut seperti IDT, KUT, PPK, dan beberapa yang lainnya meskipun program-program tersebut hasilnya belum signifikan sebagaimana yang diharapkan. Terakhir pada tahun 2017 diluncurkan program PEMP namun hasilnya juga belum maksimal setelah melalui evaluasi (Gasim, 2017). Bahkan, di era Pandemi Covid-19 ini masyarakat Kecamatan Bilato dan Kecamatan Batudaa Pantai telah memperoleh Bantuan Tunai Langsung dari pemerintah melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten (Ivan, 2020). Namun demikian, bantuan

pemerintah tersebut sifatnya sementara dan cukup meringankan beban masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Mencermati uraian di atas, terlihat bahwa meskipun pemerintah telah lama membuat program pengentasan kemiskinan bagi nelayan, namun semuanya belum menampakkan hasil yang signifikan. Beberapa bantuan lainnya hanya berorientasi sementara dan tidak menyentuh ke akar persoalan yang dialami masyarakat nelayan.

B. Rumusan Masalah

Kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan pesisir merupakan situasi yang harus mereka jalani. Rendahnya pendapatan dan cuaca yang sering tidak bersahabat sehingga mereka tidak bisa melaut menngkondisikan mereka harus memiliki strategi agar tetap survive sekaligus strategi alternatif atas sumber pendapatan lainnya. Meskipun pada saat bersamaan ada upaya pemerintah meringankan beban hidup mereka tetapi upaya tersebut sifatnya tentatif dan jangka pendek. Hal yang dibutuhkan adalah program yang berdampak jangka panjang terhadap masyarakat nelayan pesisir tersebut.

Berdasarkan uraian atau pemaparan pada latarbelakang proposal penelitian ini dan temuan masalah, maka diajukan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi keluarga nelayan yang menimbulkan kondisi kemiskinan nelayan di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana dinamika strategi bertahan hidup yang ditempuh nelayan miskin di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi?
3. Sejauhmana upaya alternatif pemerintah memberdayakan aspek-aspek kehidupan sosial budaya keluarga nelayan di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan segenap masalah yang dihadapi masyarakat nelayan miskin selama ini di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
2. Menggambarkan dan menganalisis dinamika strategi bertahan hidup dari keluarga nelayan miskin di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
3. Menganalisis upaya alternatif pemerintah memberdayakan aspek-aspek kehidupan sosial budaya di Desa Olimeyala Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: (1) manfaat akademik yaitu bermanfaat bagi pengembangan kajian strategi bertahan hidup dan strategi nafkah. (2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam kajian tentang pengembangan masyarakat nelayan pesisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan Nelayan dan Penyebabnya

1. Konsep Kemiskinan

Istilah “miskin” dalam kamus bahasa Indonesia mengandung pengertian sebagai tidak berharta benda, serta kekurangan (berpenghasilan rendah) (KKBI, 2021). Suparlan menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah yaitu: adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar hidup yang rendah ini secara langsung nampak mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin”.

Suparlan (1984) mendefinisikan penduduk miskin antara lain: (1) Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/ rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan. (2) Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (3) Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disertakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan.

Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika diartikan dengan pendapatan dan kebutuhan dasar maka kemiskinan dapat diukur secara langsung, yaitu ketika pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum maka orang ini dapat dikatakan miskin. Dalam hal ini kemiskinan ditentukan oleh keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Selain itu oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) digunakan indikator untuk keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda yakni untuk di rumah, tempat pekerjaan, tempat belajar (sekolah), dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada keluarga yang sakit di bawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana (KB) pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Dan apabila indikator tersebut di atas tidak dipenuhi oleh sebuah keluarga. Maka oleh BKKBN dikatakan keluarga pra sejahtera (pedoman pendataan BKKBN).

Sejalan dengan Emil salim (Sumrah, 2008) bahwa orang miskin memiliki 5 ciri-ciri yakni meliputi antara lain:

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang tidak cukup, modal ataupun keterampilan, faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Tidak sampai tamat sekolah dasar waktu mereka umumnya habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar, demikian pun para anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena mereka harus membantu orang tuanya mencari tambahan penghasilan.
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah. Kalaupun ada hanya relatif kecil, pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian, karena pertanian bekerja atas dasar musiman, maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin.

5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan kota tidak siap menampung gerak urbanisasi dari desa.

Survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS) 1993, memberikan gambaran bahwa pendapatan keluarga dalam jumlah real rupiah dapat diukur dengan menggunakan skala dari standar SUSENAS tersebut misalnya dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga sebanyak 5 jiwa, terdiri dari 3 orang anak tambah suami dan istri dengan menggunakan tolak ukur kemiskinan di daerah pedesaan secara nasional Rp18.244 perkapita perbulan, maka dapat dilakukan penggolongan pendapatan rumah tangga rendah, sedang, dan tinggi di daerah pedesaan.

Tiga jenis indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah kemiskinan absolut termasuk timbulnya kemiskinan. Indeks iuran kemiskinan dan indeks kesulitan kemiskinan. kemiskinan absolut mengukur jumlah dari penduduk miskin. Sedangkan timbulnya kemiskinan atau rasio menghitung kepala ditunjukkan sebagai persentase kemiskinan pada total penduduk. Jurang kemiskinan di pihak lain. Mengukur rata-rata iuran pemisah antara pendapatan kaum miskin dengan garis kemiskinan, sedangkan indeks kesulitan adalah jurang kemiskinan yang sensitif di distribusikan.

Kemiskinan absolut adalah kondisi di bawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan pakaian dan perlindungan. Pengukuran

kemiskinan absolut yang baik merupakan pengukuran yang dapat benar-benar mewakili tingkat kemiskinan itu sendiri, tambahan pula dari pandangan kebijakan pengukuran kemiskinan harus berpihak kepada yang benar-benar miskin.

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah “kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal “ke-melek-huruf-an” (kemampuan membaca; literacy) serta tingkat kesehatan dan gizi”. Selain itu diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Definisi atau pengertian kemiskinan perlu pula dibedakan antara Kemiskinan Absolut (*Absolute Poverty*), dan Kemiskinan Relatif (*Relative Poverty*) maupun Kemiskinan Struktural (*Struktural Poverty*).

Kedua bentuk Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif perlu penanganan yang spesifik dalam proses pengetasannya. Pengentasan Kemiskinan Absolut ditempuh dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat rehabilitasi sosial (*social rehabilitation, emergency, cash programme*) dan pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*). Sedangkan pengentasan Kemiskinan Relatif ditempuh dengan usaha-usaha memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat (*income distribution*).

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia masih berfokus pada pengentasan Kemiskinan Absolut, misalnya Program Gerakan

Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang terbaru seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam prakteknya pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan yang terakhir di atas banyak menghadapi kendala, baik kendala pendanaan, teknis maupun non-teknis.

Untuk mengukur kemiskinan, diperlukan standar yang disebut garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan ini mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Selain melihat GK pada periode sebelumnya, perhitungan GK juga mempertimbangkan perubahan harga (inflasi/deflasi). "Kebutuhan hidup dalam hal ini adalah kebutuhan pokok (basic needs) yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan partisipasi masyarakat. Ukuran ini akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya serta sesuai jenis-jenis kebutuhan pokoknya". (Sumardi & Evers, 1994).

Sayogyo dalam Sumardi & Evers (1994) misalnya, memberi batasan, seseorang disebut miskin bila pendapatannya setara atau kurang dari 320 kg beras per tahun per orang untuk di pedesaan dan 480 kg beras per tahun per orang untuk di perkotaan. Papanek (1986) menggunakan ukuran kalori. Kalori yang dibutuhkan seseorang untuk hidup per hari adalah 1.821 kalori

atau setara dengan sekitar 0,88 kg beras bila dikaitkan dengan dengan ukuran yang digunakan Sayogyo. Apa yang dikemukakan di atas baru merupakan kebutuhan makanan, belum termasuk kebutuhan lain-lain seperti sandang, pemukiman, pendidikan, dan lain-lain. Cara yang lebih akurat untuk menetapkan garis kemiskinan adalah dengan menghitung Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) tiap rumah tangga.

Indikator terkini, GK terdiri dari GK makanan (nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang setara 2.100 kilokalori/kapita/hari) dan GK nonmakanan (nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok nonmakanan). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan miskin.

Setiap daerah juga memiliki GK masing-masing. Artinya, penentuan GK tak dipukul rata untuk semua wilayah. Bahkan, untuk daerah perkotaan dan perdesaan juga dibedakan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pola konsumsi masyarakat dan harga komoditas tiap wilayah.

Sumber data dalam penghitungan GK nasional adalah modul konsumsi yang terdapat pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penghitungan pengeluaran konsumsi makanan dalam GK nasional melibatkan 52 komoditi. Sedangkan, item pengeluaran nonmakanan yang menjadi bagian penghitungan GK nasional mencakup 51 jenis untuk wilayah perkotaan dan 47 jenis untuk wilayah perdesaan (BPS, 2016).

Sebagai gambaran, pada September 2020, garis kemiskinan (GK) tercatat sebesar Rp 458.947/kapita/ bulan, atau Rp 2.216.714/rumah tangga/bulan dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,83 (4-5 orang per rumah tangga). Penduduk dengan pengeluaran di bawah Rp 458.947/kapita/bulan dikategorikan miskin, atau rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp 2.216.714 merupakan rumah tangga miskin.

Berbeda dengan pengukuran kemiskinan yang diadopsi Indonesia, lembaga internasional seperti Bank Dunia mengukur angka kemiskinan dengan pendekatan garis kemiskinan internasional yang mengacu pada keseimbangan kemampuan berbelanja.

PPP merupakan indeks harga antarnegara yang merupakan ukuran sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang dalam jumlah yang sama secara riil relatif terhadap negara pembanding, umumnya menggunakan perbandingan dengan Amerika Serikat.

Konsep PPP itu terkait erat dengan definisi tingkat harga di tiap negara yang merupakan harga rata-rata tertimbang dari sejumlah barang menggunakan jenis barang dan bobot yang sama di antara negara-negara tersebut.

Bank Dunia menggunakan satu standar GK yang sama untuk melihat kemiskinan di tiap negara. GK atau batasan yang digunakan Bank Dunia saat ini adalah 1,9 dollar AS per hari.

Adapun dari jenisnya, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk. Pertama, kemiskinan absolut, yaitu pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketiga, kemiskinan kultural akibat kultur malas, pemboros, dan tidak kreatif meski ada bantuan dari pihak luar. Keempat, kemiskinan struktural karena rendahnya akses terhadap sumber daya akibat sistem sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

Versi lain dalam mendefinisikan Kemiskinan Absolute adalah: “tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup”. Angka KFM ini berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu daerah ke daerah lainnya serta bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. PBB pernah menetapkan “Garis Kemiskinan Internasional” sebesar US \$ 125,- per orang per tahun atas dasar harga konstan tahun 1980. Itu berarti seseorang yang konsumsinya kurang dari US \$ 125,- per tahun dapat digolongkan berada di bawah Garis Kemiskinan atau berada dalam Kemiskinan Absolut (Todaro, 1995).

Secara sederhana Kemiskinan Relatif dapat dilihat dengan memperbandingkan proporsi atau persentase penduduk yang berada di

bawah Garis Kemiskinan Absolut dengan jumlah penduduk keseluruhan. Untuk lebih memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang tingkat kemiskinan relatif atau pemerataan kesejahteraan ekonomi perlu diketahui distribusi pendapatan.

Menurut Prayitno (1987) bahwa kemiskinan relatif dinyatakan dalam beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh beberapa kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan porsi pendapatan nasional diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa usaha dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang sebaik-baiknya bagi keluarga dan masyarakat akan tercipta melalui suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial, materi maupun spiritual yang diikuti oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir batin yang tak lain menjelaskan hubungan yang erat dengan aspek sosial ekonomi masyarakat, yang merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kepentingannya, antara lain meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga, pengetahuan, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah-masalah sosial dengan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Pendekatan kebutuhan dasar merupakan suatu acuan dalam pembangunan alternatif. Friedman (Suyanto, 1996) mendefinisikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi :

1. Terpenuhinya kebutuhan minimum rumah tangga bagi konsumsi pribadi seperti : makanan, minuman, dan perumahan.
2. Tersedianya pelayanan dasar untuk konsumsi bersama kolektif dalam komunitas seperti: air bersih, penerangan, transportasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.
3. Kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan diri mereka sendiri.
4. Kepuasan atas tingkat kebutuhan dasar yang mutlak dalam kerangka hak asasi manusia secara lebih luas.
5. Adanya kesempatan kerja sebagai suatu cara dan tujuan dalam suatu strategi kebutuhan dasar.

Fenomena kemiskinan bukan hanya terbatas kepada kurangnya keuangan, melainkan melebar kepada kurangnya kreatifitas, inovasi kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan berbagai potensi dan sumber daya yang ada, atau secara khusus persoalan itu telah melingkar diantara lemahnya penyeimbangan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk berkembang di masyarakat, semua itu akan berlangsung apabila proses marjinalisasi dan pihak yang berkuasa berlangsung pula.

Hal yang melatar belakangi kemiskinan menurut Suyanto (1996) dibedakan atas dua kategori antara lain :

- a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang kurang dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.

b. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan diartikan sebagai kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata, dengan demikian sebagian anggota masyarakat masih tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

2. Penyebab Kemiskinan Nelayan

Mencermati realitas kemiskinan nelayan, maka hal ini bersifat multidimensi. Ia terkait dengan berbagai faktor seperti ekonomi, aspek pangan dan papan, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana terdefinisi dalam Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial bahwa: "Rendahnya penghasilan dan sumberdaya produktif yang menjadi jaminan kelangsungan hidup berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; tingkat kesehatan yang rendah; rendahnya dan terbatasnya akses bidang pendidikan dan layanan-layanan inti lainnya; kondisi tak wajar akibat penyakit yang terus meningkat; hidup menggelandang serta tempat tinggal yang tak layak; lingkungan yang tak

kondusif, serta diskriminasi dan keterasingan sosial; dengan ciri rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. (Sahdan, 2005).

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS bisa digunakan untuk mengamati kemiskinan nelayan karena memiliki makna yang luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat (Sahdan, 2005).

Karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kultural, struktural, dan sistemik (Kasim, 2006). Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat

yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Kemiskinan semacam ini termasuk kemiskinan yang paling mendalam dan bersifat kronis. Mereka menerima kondisi hidup sebagaimana adanya, penuh dengan kepasrahan, tidak memperlihatkan keinginan untuk keluar dari kondisi kemelaratan.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya perbedaan struktur sosial. Perbedaan struktur sosial tersebut diakibatkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat pemerintah. Selama golongan kecil yang kaya raya masih menguasai berbagai segi kehidupan masyarakat, selama itu pula struktur sosial yang berlaku masih terus bertahan. Inti dari kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat oleh manusia. Golongan yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau petani yang tanah miliknya sangat kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan keluarganya, kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (*unskilled labor*), atau golongan ekonomi sangat lemah. Dimensi berikutnya adalah kemiskinan sistemik. Kemiskinan sistemik adalah kemiskinan yang terjadi karena sekelompok yang kaya dan hidup dalam kemewahan berada dalam kebudayaannya sendiri serta berusaha menguasai dan mengontrol berbagai segi kehidupan baik dari sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Kelompok

ini justru bersifat konservatif dan menyebabkan terjadinya kemiskinan yang sebanyak-banyaknya dan menjadikan segelintir manusia kaya menjadi “raja” dan lainnya menjadi miskin. Kemiskinan sistemik ini sengaja dirancang secara sistematis dan terstruktur agar masyarakat dapat dimiskinkan.

B. Strategi Pemecahan Masalah dan Dinamika Strategi Pemecahan Bertahan Hidup

1. Konsep Strategi

Secara harfiah dalam kamus lengkap Indonesia, strategi diartikan sebagai cara siasat perang (M.B Ali dan T.Deli, 1997). Dalam terjemahan bebas, strategi diartikan sebagai taktik atau cara perhitungan dari rangkaian kebijaksanaan dengan pelaksanaan yang menggunakan metode atau teknik dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk digunakan sebaik mungkin agar tetap bertahan hidup. Dilihat dari masyarakat miskin selain bertahan hidup dengan mengolah sawah sendiri atau dengan mengolah sawah milik orang lain, masyarakat miskin menerapkan strategi kelangsungan hidup dengan melakukan pekerjaan lain.

Strategi yang diterapkan masyarakat miskin tidak lepas dari masalah kebutuhan hidup atau berkisar tentang masalah perut. Karl Marx menulis bahwa “soal kedamaian dunia itu terletak pada masalah perut. Setiap perut manusia kenyang dan senang, maka dunia dengan sendirinya akan damai”.

(Hidayatullah, 2007). Namun demikian, jika menunggu kedamaian sampai perut manusia kenyang, suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Perut manusia tidak akan kenyang sekalipun seluruh harta di dunia dihabiskan. Tesis Marx menjadi sebuah renungan bahwa kelangsungan hidup berkisar pada masalah perut atau pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan memanfaatkan kebutuhan ekonomi yang serba terbatas akan memaksa manusia untuk melakukan strategi untuk bertahan hidup (*life survive*).

Kemiskinan dalam kehidupan manusia pada belahan duniapun senantiasa tidak terlepas dari kebutuhan hidup dan strategi bertahan hidup, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang tinggal dipedesaan. Masyarakat akan bereaksi dengan rangsangan-rangsangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala upaya dengan menggunakan cara, metode, dan pengalaman manusia merupakan salah satu usaha demi kelangsungan hidup. Strategi sering dilakukan untuk menyiasati kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam keadaan mendesak atau mendadak. Strategi dengan melakukan pinjaman, menjual barang-barang simpanan seperti perhiasan, menggadaikan barang, dengan usaha lembur. Strategi ini sering dilakukan untuk kebutuhan mendadak seperti dalam keadaan sakit, membayar sewa rumah, kekurangan dalam kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan hidup tidak akan lepas bagaimana strategi yang diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehubungan dengan ini, George Corner mengemukakan bahwa “Strategi-strategi kelangsungan hidup berputar sekitar akses sumber daya dan pekerjaan. Dalam perebutan ini kelompok-kelompok miskin bersaing; bukan hanya dengan yang kaya, akan tetapi diantara mereka sendiri”. (Coner dalam DC Contes dan Sharir, 1980)

Segala usaha, daya dan potensi yang dimiliki oleh setiap orang, tentunya bersaing dalam memenuhi kebutuhan hidup agar tetap *survive*. Strategi kelangsungan hidup yang digunakanpun berbeda sesuai dengan daya dan juga kesempatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu faktor lingkungan tidak dapat dilepaskan. Masyarakat harus menggunakan, berpartisipasi, dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat tetap hidup.

Manusia atau masyarakat menurut Gouldner (Poloma, 2004) diartikan bahwa manusia sebagai merupakan pelaku yang bebas dan sebagai merupakan makhluk yang sudah ditentukan. Semua manusia mampu bernalar dan melalui itu mereka memahami dirinya dan orang lain. Walaupun demikian manusia itu juga berpartisipasi dalam berbagai kondisi-

kondisi lain; mereka digerakkan oleh berbagai kekuatan biologis, ekologis, psikologis dan historis yang secara diam-diam mengendalikan mereka dalam bentuk hukum-hukum.

Pentingnya hubungan sosial diantara sesama manusia merupakan syarat terjadinya kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam masyarakat. Dikemukakan Gillin dan Gillin bahwa: Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan-hubungan antar kelompok atau orang per orang dengan kelompok". (Andriadi, 2002).

Keterlekatan dalam hubungan sosial merupakan salah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Menurut Granoveter menjelaskan bahwa: Konsep keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang isituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor...jadi hubungan sosial sebagai suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama diantara individu-individu atau kelompok-kelompok". (Damsar, 2002)

Seorang atau kelompok yang terletak dalam jaringan hubungan sosial adalah penting dalam penentuan banyaknya tindakan sosial dan jumlah dari hasil institusional, misalnya apa yang terjadi dalam produksi, distribusi dan konsumsi sangat banyak dipengaruhi oleh keterlekatan orang dalam hubungan sosial.

Dalam Sosiologi, konsumsi dipandang bukan sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia akan tetapi terkait pada aspek sosial budaya (Damsar, 2002). Aspek sosial budaya tidak lepas dari gaya hidup suatu masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Muller (1989) tentang gaya hidup seperti dikutip oleh Damsar bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam gaya hidup. Di antaranya:

1. Pendekatan Psikologi. Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan sosial tidak hanya disebabkan oleh teknik, ekonomi, dan politik tapi juga dikarenakan nilai. Pendekatan ini melihat gaya hidup atas nilai atas nilai dan kebutuhan yang dimiliki.
2. Pendekatan kuantitatif sosial struktur. Pendekatan ini mengukur gaya hidup berdasar konsumsi yang dilakukan seseorang, yang dapat diukur sangat berhasil (*Visible Successes*), pemeliharaan (*Maintenance*) sedang (*High Life*) konsumsi rumah tangga (*Home Life*) tidak untuk dijual kembali.

Strategi dan upaya terus dilakukan untuk tetap bertahan hidup, maka setiap orang membutuhkan makanan dan minuman, tempat tinggal dan sebagai makhluk sosial, setiap orang senantiasa menjalin interaksi dengan sesamanya. Untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan manusia mutlak melakukan usaha usaha dan strategi guna memenuhi kebutuhannya. Walaupun demikian keluarga miskin masih mempunyai kemampuan untuk *survive* dalam berbagai kondisi. Mereka telah

mempunyai strategi yang handal dalam menghadapi goncanaan, walaupun di satu sisi strategi yang dibangun berdampak hal yang lain misalnya anak yang tidak mampu disekolahkan atau berdampak pada keterlantaran anak.

Strategi kelangsungan hidup sangat identik dengan kelompok masyarakat miskin. Keadaan miskin ini merupakan bentuk dari ketidakmampuan individu atau rumah tangga maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum mereka. Secara konsepsi kemiskinan merupakan bentuk dari keadaan serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan utama seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, serta pekerjaan maupun akses untuk mendapatkan sumber daya.

Strategi kelangsungan hidup bagi masyarakat miskin dapat diartikan dalam kemampuan menghadapi permasalahan (Gunawan dan Sugianto, 2000). Kemampuan menghadapi permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan hidup dari himpitan ekonomi maupun non ekonomi.

2. Konsep Strategi Nafkah

Mata pencaharian adalah istilah sosiologis yang lebih luas yang berakar pada konsep keadilan sosial, di mana budaya dan identitas menjadi dasarnya dan bergantung pada lanskap dan ekologi. Ini terkait dengan komunitas dan hak milik yang menunjukkan martabat, kontrol,

pemberdayaan, dan keberlanjutan selain dari penciptaan pendapatan (IGGlobal, 2021).

Mata pencaharian adalah sarana mencari nafkah. Ini mencakup kemampuan, aset, pendapatan, dan aktivitas orang yang diperlukan untuk mengamankan kebutuhan hidup. Mata pencaharian berkelanjutan jika memungkinkan orang untuk mengatasi dan pulih dari guncangan dan tekanan (seperti bencana alam dan gejolak ekonomi atau sosial) dan meningkatkan kesejahteraan mereka dan generasi mendatang tanpa merusak lingkungan alam atau basis sumber daya (IFRC, 2021).

Mata pencaharian mencakup orang, kemampuan mereka, dan pengaturan untuk mencari nafkah. Sarana hidup meliputi makanan, pendapatan, dan aset. Mata pencaharian mencakup semua sumber daya (kapasitas) untuk menopang kebutuhan dasar, termasuk makanan, papan, sandang, nilai-nilai budaya, dan hubungan sosial. Mata pencaharian yang berkelanjutan memelihara dan meningkatkan aset yang menjadi sandaran mata pencaharian. Mata pencaharian berkelanjutan juga memiliki efek menguntungkan pada mata pencaharian lainnya, termasuk generasi mendatang. Bahaya alam dapat menjadi ancaman serius bagi mata pencaharian, tetapi mata pencaharian yang berkelanjutan secara sosial dapat mengatasi dan pulih dari stres dan guncangan. Mata pencaharian yang berkelanjutan berarti bahwa kebutuhan dasar dipenuhi setiap hari dan dalam jangka panjang (Wisner et al., 2004).

Studi Purnomo (2006) membagi strategi nafkah menjadi dua kelompok yaitu strategi nafkah berbasis modal alami dan bukan modal alami. Rumah tangga memiliki pilihan sendiri mengenai modal alami, pendapatan *in cash* dari modal alami yang ada di desa tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sehingga harus memanfaatkan modal sosial serta bermigrasi keluar desa agar memiliki pendapatan tambahan.

C. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin Oleh Pemerintah

1. Program Pemerintah

Pemerintah merupakan penanggungjawab program kemiskinan masyarakat. target yang diharapkan adalah menurunnya angka kemiskinan tersebut agar pemerintah bisa mengalihkan pembiayaan pada sektor lainnya. Melalui berbagai programnya, pemerintah berharap supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan melalui pengembangan hidup berkelanjutan.

Beberapa program andalan pemerintah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran target pembangunan tersebut meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hal tersebut diwujudkan dengan cara memperbaiki kebijakan penyaluran raskin dan bansos dengan tujuan mempertahankan daya beli penduduk miskin agar tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan, penyediaan layanan

kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), beasiswa bagi 21 juta siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), upaya program SJSN Ketenagakerjaan, memberi stimulan rumah kepada keluarga fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan dengan target sasaran 200 kampung nelayan dan petani. (Ariyanti, 2015)

Berbagai program bantuan yang pernah diluncurkan oleh pemerintah (Jokowi) khususnya pada periode pertama pemerintahannya antara lain: program jaring pengaman sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Bantuan Langsung Tunai Desa, Sembako, dan program Gratis Subsidi Listrik. Tujuan utama skema program bansos tersebut adalah untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga yang kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin. Kedua, bantuan untuk nelayan dan petani juga bisa dilakukan lewat subsidi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan 34 Triliun untuk program ini. Dengan begitu, petani dan nelayan bisa mengakses modal kerja lewat kredit usaha rakyat tanpa dikenai bunga tinggi. (Ihsanuddin, 2020).

2. Pemberdayaan

Empowerment yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat peningkatan kompetensi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri

dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang merangsang kemampuan untuk berkarya. Adapun definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli sebagai berikut:

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment," yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Menurut Suhendra (2006:74-75) adalah "suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi".

Menurut Ife (dalam Suhendra, 2006:77) adalah "meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)".

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah

"upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".

Menurut Novian (2010) pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.

Suharto (2006: 58) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*)
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan

yang mempengaruhi mereka.

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog". Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham

termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.'

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Pemberdayaan itu sendiri memiliki tujuan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Sementara itu, Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan social yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara local maupun nasional oleh karena, itu pemberdayaan sifatnya individual dan sekaligus kolektif pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang

menyangkut hubungan- hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial.

Di samping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi diri bergerak dari korban (*victim*) ke pelaku (*agent*) karena orang mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingan (Shragge, 1993).

Pemikir lain Paul (1987), menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan dari perspektif lingkungan pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan (Borrini, 1991; Shatty 1991).

Menurut Gai (2020) upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan dengan konsep pendekatan kehidupan berkelanjutan. Konsep ini digunakan dengan mencakup semua aspek penting dalam kehidupan sehari-hari seperti aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Konsep yang bisa digunakan antara lain: (a) Konsep sosial. Konsep ini difokuskan untuk menumbuhkan kepercayaan diri antar para nelayan dalam keluarga besar nelayan. Selain itu, untuk menumbuhkan

komunikasi antar sesama nelayan. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi secara rutin dan bertahap. (b) Konsep lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang kondisi alam seperti perubahan iklim sehingga bisa menjadi acuan ketika ingin melaut. Konsep ini dapat dilakukan dengan pengenalan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh para nelayan. (c) Konsep fisik. Konsep ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang pentingnya menjaga sarana dan fasilitas umum lainnya sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari seperti infrastruktur lingkungan sekitar. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan gotong royong memperbaiki jalan sebagai alat penghubung serta pembangunan tempat menjual ikan yang dapat menampung hasil tangkapan nelayan.

Prinsip yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu: (1) Pemberdayaan bersifat demokratis sehingga tidak memaksa pihak nelayan. Tiap nelayan memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga pemberdayaan dilaksanakan sesuai kebutuhan. (2) Dalam pelaksanaannya difokuskan untuk membangun kesadaran masyarakat nelayan sehingga memudahkan dalam pengembangan potensi yang dimiliki. (3) Memadukan konsep dengan budaya lokal contohnya gotong royong sebagai bentuk upaya pemberdayaan sosial. (4) Dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar mempunyai hasil yang maksimal. (5) Kesabaran menjadi kunci penting

dalam pelaksanaan pemberdayaan karena dihadapkan dengan masyarakat yang memiliki karakter dan pemikiran yang beragam. (6) Pemberdayaan perlu dilaksanakan dengan semua aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Kandati, Mantiri, & Moninjta, 2019).

D. Perspektif Teoretik

1. Teori Konstruksi Sosial

Tesis utama Berger dan Luckmann adalah bahwa manusia dan masyarakat merupakan produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya.

Proses dialektika tersebut mempunyai tiga tahapan dimana Berger dan Luckmann menyebutnya sebagai "Momen". Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat dipahami sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas obyektif yang bisa jadi akan dihadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas generis.

Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang obyektif. Bahkan ia dapat dihadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan.

Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas obyektif, ada diluar kesadaran manusia. Ada "disana" bagi setia orang. Realitas obyektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami setiap orang.

Ketiga, internalisasi proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia obyektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala

internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Realitas itu bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tidak juga sesuatu yang dibentuk secara ilmiah. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Oleh karena itu, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang yang memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, profesi, pendidikan tertentu, dan lingkungan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Paradigma konstruktivistik melihat bagaimana suatu realitas sosial dikonstruksikan. Fenomena sosial dipahami sebagai suatu realitas yang telah dikonstruksikan. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana suatu atau peristiwa tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.

Penelitian ini berupaya merumuskan pemahaman konstruksi sosial atas dinamika dan strategi hidup masyarakat nelayan di dalam pendekatan sosiologi. Dimana manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang muncul diantara mereka, makna tersebut dicerna dan disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung. Berbagai makna senantiasa mengiringi tindakan sosial, sedangkan arti sebuah makna terkait pada konstruksi sosial. Sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial adalah

sesuatu yang dibangun berdasarkan komunikasi dan interaksi antar individu.

Konstruksi dapat disepakati secara sadar maupun tidak sadar oleh masing-masing individu, yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat untuk memahami atau mengetahui suatu hal tanpa terlebih dahulu harus menggunakan metodologi ilmiah seperti yang dilakukan oleh para akademisi terlebih dahulu, mereka cukup menempatkan makna dan nilai pada pengalaman yang sama berdasarkan kepentingan dan kecocokan yang telah mereka sepakati bersama. Konstruksionis Sosial berupaya memahami makna dan nilai yang menjadi sebuah pengetahuan bersama dalam masyarakat secara spesifik.

Pendekatan teoritis antara positivistik dan konstruksionistik sosial memiliki beberapa perbedaan. Positivis cenderung menilai adanya kebenaran yang obyektif mengenai realitas, sementara konstruksionis sosial percaya kebenaran sebagai *cultural artifact*. Positivis percaya bahwa kebenaran hanya didapat melalui metode ilmiah, sementara konstruksionis mencari kebenaran melalui nilai dan makna yang berkembang di masyarakat.

Gergen (1999) melihat adanya pemahaman yang salah dalam pendekatan positivistik. Pertama, mengenai sifat ketidak berpihakan positivistik di dalam penelitian. Para pemikir positivis selalu menggemakan upaya mereka dalam menggambarkan dunia apa adanya, tanpa bias dan

hanya berpihak pada ilmu pengetahuan yang objektif. Kenyataannya tidak pernah ada ilmu pengetahuan yang tidak berpihak, segala sesuatu selalu ada tujuan bahkan seorang peneliti pun melakukan riset selalu bukan tanpa alasan, mereka memilih dengan sebuah tujuan.

Kedua, pemahaman kondisi sebab akibat. Penelitian empiris positivistik, selalu didasari dari model sebab akibat. Mereka mengamini bahwa setiap kegiatan memiliki penyebab dengan demikian pada prinsipnya penelitian mencoba memperhatikan sebab-sebab yang menstimulus suatu tindakan. Konstruksionis beranggapan bahwa ide yang menyebabkan atau yang memberikan akibat tidak bisa diamati sekedar sebab yang menyebabkan akibat tetapi sebab yang melibatkan proses sebelum menjadi akibat. Bentuk sebab akibat yang dijadikan model dan diterima sebagai kebenaran hakiki, akan menempatkan manusia tak ubahnya sebagai sesuatu yang mekanik (robot) yang melupakan konstruksi dialogis, proses interaksi, dan komunikasi didalam realitas sosial.

Ketiga, merubah hasil observasi ke dalam angka-angka. Penelitian-penelitian yang dilakukan secara empirik positivistik cenderung mengubah hasil yang didapat menjadi angka-angka, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan pengukuran. Hal ini mungkin sekali mereduksi suatu hal yang multi interpretatif, seperti pemahaman bahasa.

Keempat, Pencarian jawaban yang paling benar. Penelitian empiris selalu diharapkan mendapatkan jawaban yang benar dan tepat secara

universal. Di dalam kajian sosial, tentu saja jawaban ini sulit untuk didapat karena kondisi sosial yang cenderung berubah-ubah dan adanya penafsiran mengenai kondisi sosial yang tidak sama.

Setelah memaparkan permasalahan di dalam penelitian empiris, Gergen (1999) menyebutkan ada empat asumsi yang melekat pada pendekatan konstruksionis.

Pertama, dunia ini tidaklah tampak nyata secara obyektif kepada pengamat, tetapi diketahui melalui pengalaman yang umumnya dipengaruhi oleh bahasa. Gergen (Denzin & Lincoln, 2009) menyatakan bahwa “tidak ada referen dunia-riil yang bisa diidentifikasi secara terpisah yang dapat menjadi rujukan bahasa deskripsi sosial (atau penjelasan). Bahasa merupakan satu-satunya realitas yang bisa diketahui.

Kedua, Kategori linguistik yang dipergunakan untuk memahami realitas bersifat situasional, karena kategori itu muncul dari interaksi sosial dalam kelompok orang pada waktu dan tempat tertentu.

Ketiga, bagaimana suatu realitas dipahami pada suatu waktu dan ditentukan oleh konvensi komunikasi yang berlaku pada waktu tersebut. Oleh karena itu stabilitas dan instabilitas pengetahuan banyak bergantung pada perubahan sosial ketimbang realitas obyektif di luar pengalaman.

Keempat, Pemahaman realitas yang terbentuk secara sosial membentuk banyak aspek kehidupan lain yang penting, bagaimana kita

berfikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari umumnya ditentukan oleh bagaimana kita memahami realitas.

Keempat asumsi tersebut menekankan bahwa suatu konstruksi sosial sangatlah terkait pada konteks situasi tertentu. Hal ini menjelaskan pula bahwa situasi keadaan masyarakat di setiap tempat selalu berbeda. Kebutuhan, nilai, dan perhatian didalam masyarakat juga selalu berbeda. Maka sewajarnya sesuatu yang dikonstruksi di dalam masyarakat berbeda-beda pada setiap konteks, sejarah dan situasi, sesuatu hal pun tidak akan muncul jika hal tersebut tidak dibangun karena memang tidak diinginkan dan tidak dipikirkan.

Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa kenyataan sosial memiliki dua dimensi, subjektif dan objektif, yang dalam proses sosial kedua dimensi itu senantiasa berdialektika dalam tiga momen simultan, yaitu *eksternalisasi* (proses penyesuaian diri), *objektivasi* (proses pelembagaan), dan *internalisasi* (proses identifikasi diri dengan masyarakat). Kenyataan sosial memiliki makna ketika individu memperoleh pengetahuan (kesadaran) melalui interpretasinya terhadap dunia subjektif dan objektif. Singkatnya, masyarakat adalah ciptaan manusia dan manusia adalah produk dari masyarakat. Itulah yang disebut konstruksi sosial, yang berlangsung terus-menerus secara berdialektik dan berdampak pada perubahan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, teori ini sekurang-kurangnya dapat menjelaskan dua hal. *Pertama*, kesadaran aktor (masyarakat nelayan) dan

struktur sosial yang melandasinya bukan dua hal yang terpisah. Artinya, konstruksi sosial Kemiskinan bukan saja dapat didekati secara struktural dengan kategori objektif, tetapi juga memperhatikan kenyataan sehari-hari tindakan sosial aktor (masyarakat nelayan) dengan berbagai artikulasi makna di balik realitas kemiskinan tersebut.

Kedua, analisis konstruksi sosial dapat menemukan makna kemiskinan di balik gejala sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti cara berpikir fenomenologi, bahwa dunia kehidupan sehari-hari merupakan realitas utama masyarakat (Parera dalam Berger & Luckmann, 1990), maka konstruksi sosial kemiskinan masyarakat nelayan akan dapat dipahami dalam berbagai dimensi makna, proses, dan situasi sosial, sedemikian rupa hingga pada akhirnya terbentuk suatu kenyataan yang dianggap sewajarnya oleh orang awam. Berdasarkan cara ini, pembentukan kenyataan sehari-hari masyarakat nelayan miskin dapat dikonstruksikan.

Berger dan Luckman (1966) tokoh pertama yang menggunakan istilah konstruksi sosial. Dalam bukunya *Social Construction of Reality*, Berger dan Luckmann menjelaskan betapa realitas kehidupan sehari-hari telah memberikan ingatan, kesadaran, dan pengetahuan yang membimbing tindakan pada sesuatu yang dianggap wajar. Indikasi seperti ini menerangkan bahwa makna dalam kehidupan sehari-hari tidak akan ada tanpa interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Lebih lanjut Berger dan Luckman menjelaskan:

"I know that my natural attitude to this world corresponds to the natural Attitude of others, that they also comprehend the objectification by which this world is ordered, that they also Organize this world around the "here and now" of their being in it and have projects for working in it. All the same, I know that I live with them in a common world. Most importantly, I know that there is an ongoing correspondance between my meanings and their meanings in this world, that we share a common sense about its reality" (Berger and Luckman, 1966: 22)

Penjelasan Berger dan Luckmann diatas memperlihatkan bahwa realitas dalam pandangan konstruksi sosial sangat mementingkan proses dialogis berkesinambungan yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, terutama pada pemaknaan yang dibentuk masing-masing individu tersebut tentang dunia. Kualitas lain yang disebutkan oleh Berger dan Luckman adalah pemaknaan "*here and now*" pada manusia tentang keberadaan dan tujuan mereka di dunia.

Konstruksi sosial yang ditawarkan oleh Berger dan Luckman ini dipengaruhi oleh konsep Fenomenologi, khususnya dari Alfred Schutz. Schutz menjelaskan tiga unsur pengetahuan yang membentuk pengertian manusia tentang masyarakat, yakni: dunia sehari-hari, sosialitas dan makna (Susan, 2003). Dunia sehari-hari adalah urutan pertama dari kenyataan. Ia menjadi dunia yang paling fundamental dan esensial bagi manusia. Sosialitas berpijak pada teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial yang terjadi setiap hari selalu memiliki makna. Sumbangan Schutz yang utama bagi gagasan fenomenologi adalah mengenai makna dan bagaimana makna membentuk struktur sosial.

Schutz (Zeitlin, 1995) menyatakan bahwa dunia sosial keseharian selalu merupakan suatu yang intersubjektif. Dalam dunia ini setiap individu berbagi dengan individu lain yang juga menjalani dan menafsirkannya. Oleh karenanya, dunia per individu secara keseluruhan tidak akan pernah bersifat pribadi sepenuhnya, dan bahkan di dalam kesadaran diri individu, selalu ada bukti hadirnya kesadaran individu lain. Ini menunjukkan bahwa kehidupan seseorang tidaklah seluruhnya merupakan produk dari tindakan-tindakannya sendiri melainkan ada tindakan orang lain secara tidak langsung. Dengan demikian setiap individu mengalami dunianya secara umum dan dalam corak yang sama. Individu-individu tersebut memiliki suatu kesadaran hidup dan saling berkomunikasi dan akhirnya mereka hidup dalam alam sejarah yang ada dan sosial-budaya yang sama.

Berdasarkan kenyataan sosial yang ada, Berger dan Luckman menganggap bahwa unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain. Semua itu nantinya akan terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar, seperti institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu mungkin saja terlihat mengkonfrontasi individu sebagai suatu kenyataan obyektif dimana individu harus menyesuaikan dirinya.

Menurut Berger dan Luckman (1966), kenyataan obyek adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena yang memiliki keberadaannya berdasarkan interaksi individu dan masyarakat. Sementara itu, kenyataan obyektif yang menjadi pengetahuan merupakan kepastian bahwa fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik, di dalam konteks tertentu. Dengan demikian, kenyataan sosial adalah kesepakatan bersama manusia terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul dari proses dialogis.

Kehidupan sehari-hari menampilkan realitas obyektif yang ditafsirkan oleh individu dan dimaknai secara subyektif. Hasil interaksi sosial membentuk pengetahuan bersama. Pengetahuan bersama yang dilakukan berulang-ulang berubah menjadi pembiasaan. Pembiasaan yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi, yang kemudian diwariskan ke generasi berikut dan dijaga kelestariannya oleh suatu lembaga.

2. Teori Tindakan Sosial

Menurut Weber (Ritzer, 2014) tindakan sosial dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, dapat juga tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara positif dalam situasi tertentu.

Berangkat dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi, yaitu: (1) tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata. (2) tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif. (3) tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. (4) tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. (5) tindakan itu memperlihatkan tindakan orang lain dan terarah ke pada orang lain itu.

Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu, sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang. Dilihat dari segi sasarannya, maka yang menjadisasaran tindakan sosial si aktor dapat berupa seorang individu atau sekelompok orang. Dengan membatasi suatu perbuatan sebagai suatu tindakan sosial, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak termasuk ke dalam obyek penyelidikan sosiologi. Sebagai contoh, tindakan nyata tidak termasuk sebagai tindakan sosial kalau secara khusus diarahkan kepada obyek mati. Oleh karena itu pula, Weber mengeluarkan beberapa jenis interaksi sosial dari teori aksinya. Misalnya, dua pengendara sepeda yang bertabrakan karena kurang hati-hati bukan termasuk tindakan sosial. begitupula orang yang sama-sama membuka payungnya pada waktu hujan,

bukanlah tindakan sosial, karena tindakannya itu diarahkan kepada ahujan, bukan kepada orang lain. Massa atau kerumunan yang histeris serta peniruan murni juga dikeluarkan dari obyek sosiologi. Sebabnya ialah karena reaksi yang timbul itu tanpa sesuatu yang diarahkan kepada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, persoalannya adalah bagaimana mempelajari tindakan sosial itu? Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah persoalan tentang jalan metode yang digunakan. Weber menganjurkan melalui penafsiran dan pemahaman yang disebutnya '*verstehen*'. Bila seseorang hanya berusaha meneliti perilaku (behavior) saja, dia tidak yakin bahwa perbuatan itu memiliki arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain. karenanya peneliti harus mencoba menginterpretasikan tindakan si aktor. Dalam artian mendasar sosiolog harus paham motif dari tindakan si aktor.

Terkait dengan motif, perhatian berikutnya adalah bagaimana cara memahami motif tindakan si aktor itu? Dalam hal ini Weber mengemukakan dua cara, yaitu: (1) melalui kesungguhan, (2) mencoba mengenakan dan menyelami pengalaman si aktor sehingga peneliti patut memposisikan diri sebagaimana posisi si aktor termasuk mencoba memahami suatu barang seperti yang dipahami oleh aktor.

Lebih jauh Brubaker (Ritzer, 2014) mengemukakan bahwa "ada kesadaran yang terus tumbuh, bahwa rasionalisasi terletak di jantung

sosiologi substansi Weber”. Menurut Levine (Ritzer, 2014) bahwa Weber tertarik pada rasionalitas yang diobjektifikasi, yaitu tindakan yang sesuai dengan proses sistematisasi eksternal. Adapun tipe-tipe rasionalitas yang dimaksud, adalah: (1) Rasionalitas Praktis, yaitu setiap cara hidup yang memandang dan menilai kedaiatan duniawi terkati dengan kepentingan-kepentingan individual pragmatis dan egoistis belaka. Orang ymempraktekkan rasionalitas praktis, menerima realitas yang sudah ada dan hanya memikirkan cara-cara yang paling beijaksana untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapkannya.tipe ini muncul bersama terputusnya ikatan-ikatan magis primitive dan ada secara lintas peradaban dan lintas budaya. Rasionalitas praktis membawa orang untuk tidak mempercayai segenap nilai-nilai yang tidak praktis. (2) Rasionalitas Teoretik. Yang meliputi usaha kognitif menguasai realitas melalui konsp-konsep yang semakin abstrak daripada melalui tindakan. Usaha kognitif yang dimaksud antara lain: deduksi logis, induksi, pengaitas kausalitas dan semacamnya. Rasioanlitas teoritis membawa aktor, melampaui realitas sehari-hari. Dalam usah auntuk memahami dunia sebagai suatu keteraturan. Tipe ini muncul secara lintas peradaban dan lintas sejarah. Rasionalitas teroretis sebagai efek dari rasioanlitas intelektual pada tindakan terbatas. Memuat proses-proses kognitif, tidak harus mempengaruhi tindakan dan hanya secara tidak langsung berpotensi memperkenalkan pola-pola tindakan yang baru. (3) Rasionalitas Substantif.

Bekerja dalam menata tindakan secara langsung ke dalam pola-pola melalui himpunan nilai-nilai. Rasionalitas substantive melibatkan pemilihan alat-alat, menuju tujuan dalam konteks suatu sistem nilai. Satu sistem nilai tidak lebih rasional (secara substantif) dari nilai lainnya sehingga tipe ini muncul secara lintas peradaban dan lintas sejarah, jika terdapat rumusan nilai yang konsisten. (4) Rasionalitas Formal. Tipe ini meliputi kalkulasi alat-tujuan. Tipe ini menurut Calberg (Ritzer, 2014) terjadi dengan mengacu pada kepentingan diri, dan mengacu pada aturan-aturan, hukum-hukum, dan pengaturan-pengaturan yang diterapkan secara universal. Sebagaimana perspektif Weber dalam rasionalisasi birokrasi 'pada prinsipnya merevolusi dengan alat-alat teknis, seperti yang dilakukan reorganisasi ekonomi, dari luar, pertama-tama ia mengubah tatanan material dan sosial dan melaluinya, ia mengubah manusia dengan mengubah kondisi-kondisi adaptasi dan mungkin kesempatan-kesempatan untuk adaptasi melalui penentuan rasionalitas atas alat-alat dan tujuan-tujuan.

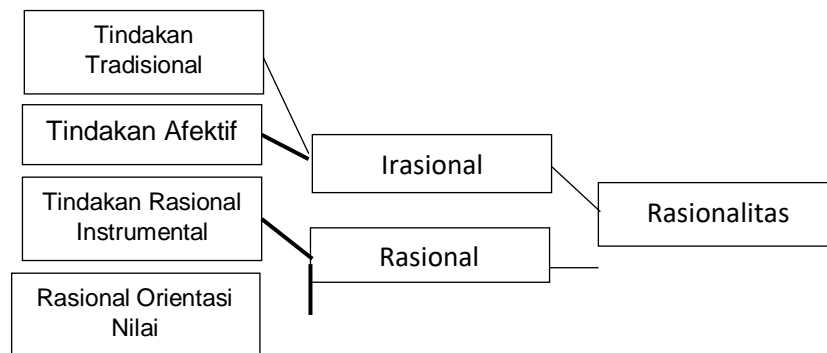
Dalam hal rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam empat tipe tindakan sosial yang didasarkan pada rasionalitas. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami. Menurut Weber bahwa tindakan sosial dapat digolongkan menjadi empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif pada pelakunya, yaitu tindakan rasional instrumental (*zweck rational*), tindakan

rasional berorientasi nilai (*werktraditional-action*), tindakan tradisional (*Traditional action*), tindakan afektif (*Affectual action*). Keempat tipe tindakan sosial tersebut adalah sebagai berikut: (1) Tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini, aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya, tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam tipe ini tidaklah absolut. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila akto berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakannya itu. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yan akan dicapai. Tindakan yang ditentukan oleh harapan pelaku objek dalam lingkungan, dan perilaku manusi alain, harapan-harapan ini digunakan sebagai 'syarat' atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. (2) Tindakan rasional berorientasi nilai. Dalam tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara mencapainya cenderung menjadi sulit untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe ini masih rasional meski tidak se rasional yang pertama karena itu dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi

tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya. Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh atas kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius, atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya. (3) Tindakan Afektif. Merupakan tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional. Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi, dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa. Tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi si aktor, antara lain: ledakan kemarahan seseorang atau ungkapan rasa cinta, kasihan, adalah contoh dari tindakan afektif ini. (4) Tindakan Tradisional. Tindakan ini didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional karena berorientasi kepada tradisi masa lampau. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang sudah terbiasa dan lazim dilakukan. Mekanisme tindakan semacam ini selalu

berlandaskan hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat.

Selanjutnya, Martono (2018) mengklasifikasi tindakan sosial Weber sebagai berikut: tindakan tradisional dan tindakan afektif merupakan wujud tindakan irasional dalam diri manusia, sementara tindakan rasional orientais nilai dan tindakan rasional instrumental merupakan wujud keberasaan tindakan rasional dalam diri manusia. Masing-masing tipe tindakan rasional tersebut dalam gambar berikut:



Gambar 2.1. Tindakan sosial Weber (Soekanto, 2017)

E. Kerangka Konseptual

Kehidupan nelayan tradisional yang miskin merupakan hasil konstruksi berbagai faktor. Faktor tersebut terdiri atas: (1) Faktor Struktural, (2) Faktor Kultural, dan (3) Faktor Lingkungan. Faktor struktural antara lain kebijakan program pemerintah yang kurang memihak nelayan miskin. Program pengentasan lebih bersifat Top-Down dan gagasannya banyak didominasi oleh pemerintah, bukan oleh nelayan yang membutuhkan perbaikan. Bahkan banyak program pengentasan kemiskinan yang salah sasaran dan kurang evaluasi atas proses implementasi dan hasil sehingga

tidak signifikan dan cenderung menghamburkan dana. Kesan yang timbul adalah menyelesaikan program pemerintah seadanya. Pada saat yang sama program pemerintah tersebut cenderung bersifat Top-Down.

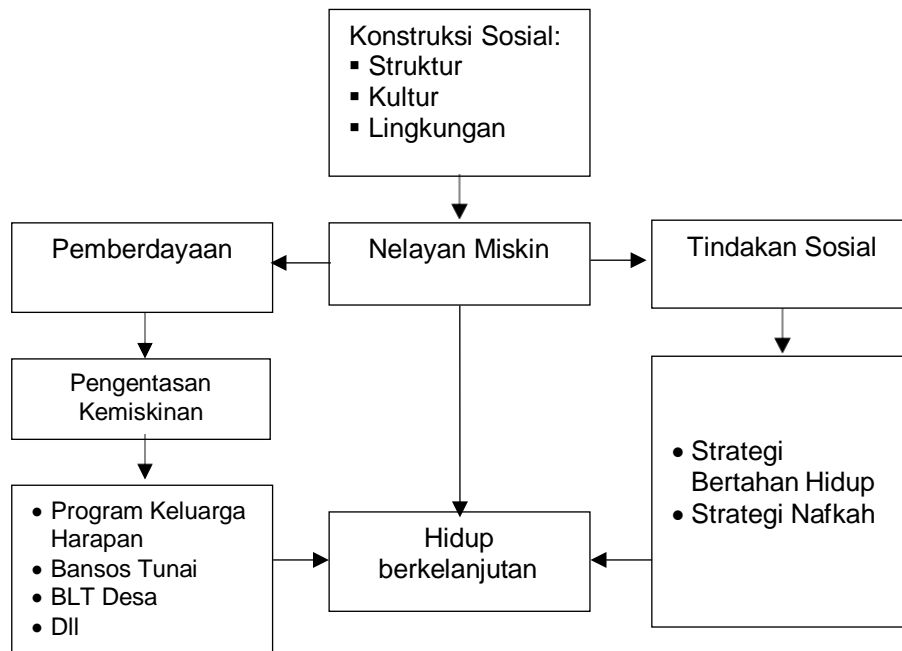
Pada saat yang bersamaan, budaya (*kultur*) masyarakat pesisir sangat deterministik, tidak berbasis prestasi sehingga kurang termotivasi untuk mengejar target, jiwa kompetisi juga rendah, ketergantungan pada juragang sehingga didominasi pekerjaannya hingga kehidupannya (bagi Sawi). Mereka bahkan harus bekerja seumur hidup untuk juragang yang diikutinya serta tidak bisa melepaskan diri dari juragang tersebut.

Adapun faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan laut dan iklim (musim). Aspek ini dapat dilihat dari ketergantungan nelayan terhadap ketenangan suasana laut yang tidak terlalu berombak agar dapat melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Musim hujan juga merupakan faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan laut. Musim hujan dikenal sebagai musim yang tidak memungkinkan mereka melaut karena ikan tidak akan naik ke permukaan air termasuk dapat menimbulkan masalah bagi nelayan.

Bagi nelayan tradisional, situasi hidupnya tersebut sebagai hasil konstruksi sosial budaya dan lingkungan menyebabkan mereka melakukan adaptasi agar dapat bertahan dan berlanjut kehidupannya. Strategi adaptasi yang dimaksud terjadi dalam berbagai cara, misalnya membatasi pengeluaran RT, meminjam uang kepada keluarga atau teman, melakukan

pekerjaan lain di luar nelayan / diversifikasi, dan sebagainya. Tentu saja, aktivitas livelihood tersebut dengan cara-caranya penuh dengan pertimbangan (rasionalitas tindakan sosial instrumental).

Pemerintah pun tidak tinggal diam melihat kemiskinan nelayan pesisir tersebut. Pemerintah melakukan pemberdayaan dengan cara mengimplementasikan berbagai program untuk membantu nelayan tersebut keluar dari kemiskinan. Meskipun program-program tersebut belum sepenuhnya efektif membantu kemiskinan nelayan tetapi setidaknya dapat bermanfaat mengurangi beban hidup mereka. Artinya, program pengentasan kemiskinan sebagai program pemberdayaan dapat menjadi faktor yang merekonstruksi kehidupan sosial nelayan tradisional menjadi lebih baik.



Gambar 2.2. Skema Kerangka Konseptual